

penolakan dari masyarakat. Upaya tersebut merupakan suatu bentuk pembangkangan konstitusi. Hal ini menimbulkan berbagai demonstrasi dari masyarakat sipil maupun kalangan akademisi. Polemik tersebut merupakan suatu indikasi kemerosotan substansi demokrasi Indonesia saat ini.

Berdasarkan laporan dari *2020 The Economist Intelligence Unit (EIU)*, Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan *2021 Democracy Report*, kualitas demokrasi menurun seiring dengan kebebasan sipil dan fungsi pemerintahan. Laporan EIU dan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan penurunan kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai penyebab menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Berdasarkan laporan EIU, Indonesia menempati urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan *2021 Democracy Report* menunjukkan Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara. Sementara laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan skor kebebasan berpendapat menurun dari 66,17 pada 2018 menjadi 64,29 pada 2019.² Berdasarkan data ini, EIU menegaskan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi ‘cacat’. Masalah fundamental yang dialami negara dalam kelompok cacat ini adalah rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti-kritik, partisipasi warga yang lemah, kinerja pemerintah yang masih minim.³

Indeks demokrasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi masa kepemimpinan Jokowi jauh lebih buruk daripada masa kepemimpinan SBY. Pada era SBY, demokrasi mengalami stagnasi, sedangkan pada masa Jokowi demokrasi mengalami degradasi. Namun, paradoksnya adalah meskipun indeks demokrasi menurun, tetapi tingkat kepuasan dan citra politik Jokowi di mata rakyat menunjukkan hal positif. Berdasarkan survei Litbang Kompas, citra politik Jokowi di mata publik selama 10 tahun menunjukkan angka positif yang stabil. Survei yang dilakukan sejak 2014 sampai tahun 2024 menampilkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Persentase kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 75,6 persen per Juni 2024, sedangkan citra positif Jokowi mencapai 89,4 persen.⁴ Hasil survei menunjukkan adanya hubungan sebanding antara kinerja pemerintah dengan citra politik Jokowi. Semakin tinggi dampak positif kinerja pemerintah terhadap publik semakin tinggi pula citra politiknya. Mengapa di tengah demokrasi yang merosot ada rakyat yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi? Hemat penulis, paradoks tersebut terjadi karena gaya populisme dari kepemimpinan Jokowi.

Mahattama menyebut demokrasi di era Jokowi sebagai banalitas. Banalitas demokrasi adalah demokrasi yang tampak pada formalitas belaka tanpa substansi. Di era Jokowi, akar utama dari banalitas demokrasi ini adalah populisme yang memprioritaskan pencitraan politik. Hal tersebut tampak pada *blusukan* Jokowi yang bukannya dimaksudkan untuk mendekatkan pemimpin dengan rakyat tetapi justru dijadikan sebagai sarana pencitraan politik.⁵ Karena itu, kita dapat memahami bahwa populisme sebagai model kepemimpinan Jokowi pada satu sisi berpengaruh pada tingginya rasa kepuasan masyarakat

²Wasisto Raharjo Jati, “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021,” *The Habibie Center THC Insights*, no. 27 (2021): 6, www.habibiecenter.or.id.

³Yohan Wahyu, “Tiga Isu Mewarnai Pemilu”, dalam Leo Agustino, Nanang Suryana, and Jonah Silas, eds., *25 Tahun Demokrasi Indonesia*, Pertama (Bandung: PT. Tubagus Lima Korporat, 2023), hlm.5.

⁴Aryo Putranto Saptohutomo, “Survei ‘Litbang Kompas’: Citra Positif Jokowi Ditopang Kinerja Pemerintahan,” Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/11/10052931/survei-litbang-kompas-citra-positif-jokowi-ditopang-kinerja-pemerintahan>.

⁵ Mahattama Banteng Sukarno, “Banalitas Demokrasi Di Era Jokowi,” Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/01/08095531/banalitas-demokrasi-di-era-jokowi>. diakses pada 10/10/2024

terhadap kinerjanya, sedangkan demokrasi pada saat yang sama hanya meninggalkan kerangka formalitas tanpa substansi.

Ada dua posisi untuk membaca indeks demokrasi yang menurun ini. Yohan Wahyu, Peneliti Utama Litbang Kompas membaginya dalam dua posisi yaitu pesimisme dan optimisme. Mereka yang pesimisme melihat indeks demokrasi yang menurun tersebut sebagai data yang tidak faktual di lapangan. *The Economist* mendapatkan data tersebut dari persepsi para ahli sehingga data tersebut bersifat elitis. Sementara itu, mereka yang optimis menganggap indeks demokrasi tersebut sebagai ‘panggilan’ bagi semua elemen bangsa Indonesia untuk membenahi kembali demokrasinya.⁶ Penulis menempatkan diri dalam kelompok optimisme. Sebagaimana Rocky Gerung, “Demokrasi adalah hasrat yang tak pernah sampai. Tapi kendati ia tidak mencukupi, kita tetap memerlukannya.”⁷ Menurut penulis, demokrasi harus selalu diperjuangkan. Pendasaran perjuangannya adalah kebebasan warga negara dan kesetaraan hak.

Tulisan ini akan membahas penyebab kemunduran demokrasi Indonesia belakangan ini dalam kaitannya dengan kepemimpinan Jokowi. Untuk itu, pertanyaan yang mendasarinya adalah apa yang menyebabkan demokrasi Indonesia menurun? Model kepemimpinan seperti apa yang dipraktikkan oleh Jokowi yang berpengaruh pada menurunnya demokrasi? Pertanyaan ini penting diajukan untuk mengetahui pengaruh model kepemimpinan Jokowi terhadap mundurnya demokrasi selama pemerintahannya. Tulisan ini diakhiri dengan penjelasan mengenai urgensi kritik sebagai solusi yang ditawarkan penulis.

Populisme dan Gaya Kepemimpinan Jokowi

Secara umum populisme merupakan konsep yang menggambarkan suatu aksi yang terorganisir sebagai reaksi atas kesenjangan yang berkepanjangan antara ‘yang berkuasa’ dengan ‘mereka yang berada di luar kekuasaan’. Secara singkat, populisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk memperjuangkan keadilan sosial dan politik.⁸ Cas Mudde mengemukakan populisme sebagai ideologi yang berpusat tipis yang menganggap masyarakat pada akhirnya dikelompokkan menjadi dua kubu homogen dan antagonis, ‘orang-orang murni’ versus ‘elit yang kasar,’ dan yang berpendapat bahwa politik harus menjadi ekspresi dari kehendak umum rakyat.⁹ Namun, definisi ini tidak memperjelas siapa yang disebut sebagai populis. Levitsky dan Loxton menjelaskan populis sebagai mereka yang memobilisasi dukungan massa dengan menyerukan anti-kemapanan dan mengambil posisi di luar sistem

⁶ Agustino, Suryana, and Silas, *25 Tahun Demokrasi Indonesia, op.cit.*, hlm.6.

⁷ Rocky Gerung ‘Mengaktifkan Politik’, dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean, ed., *Demokrasi Dan Kecewaan*, vol. 16 (Jakarta: Democracy Project, 2022), hlm.21.

⁸ Barbara Wejnert, “Populism and Democracy: Not The Same but Interconnected”, in: *The Many Faces of Populism: Current Perspectives*, dalam Otto Gusti Madung, “Populisme, Krisis Demokrasi, Dan Antagonisme | Populism, the Crisis of Democracy, and Antagonism,” *Jurnal Ledalero* 17, no. 1 (2018): 58, <https://doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.58-76>.

⁹ Marcus Mietzner, “Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 229, <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.

partai Nasional. Selain itu, populis juga mengaku untuk membangun relasi langsung dengan rakyat.¹⁰ Secara ringkas, ciri-ciri seorang populis adalah sebagai berikut: pertama, mereka yang menata diri dari luar sistem keamanan yang busuk; kedua, mengklaim membela rakyat biasa dalam melawan elit yang korup; ketiga, tidak membutuhkan lembaga perantara untuk menyuarkan kebutuhan rakyat. Menurut Mietzner, secara ideologis mereka ditempatkan pada spektrum politik kiri atau kanan tetapi pada negara yang tidak memiliki spektrum demikian mereka menggunakan pengenal agama, kelas atau regional.¹¹ Di Indonesia, populisme ini mengemuka ketika kontestasi menjelang pilpres 2014.

Pada tahun 2014, dua populis tampil sebagai orang luar yang siap bertarung dalam pilpres yakni Prabowo dan Jokowi. Prabowo tampil sebagai populis yang lebih radikal yakni nasionalis, xenofobia, dan menyerang *status quo*.¹² Sementara itu, Jokowi tampil sebagai populis yang lebih moderat. Jokowi memiliki cara komunikasi yang unik dengan rakyat, tidak terjerat dalam partai yang ada, dan mampu menunjukkan bahwa aktor yang mementingkan diri sendiri adalah penyebab masalah negara.¹³ Keresahan masyarakat terhadap pemimpin bangsa yang kurang mewakili masyarakat memperkuat harapan terhadap pemimpin yang populis. Dalam kondisi 'kelelahan politis' inilah Jokowi tampil sebagai pemimpin yang diharapkan tersebut.

Karier politik Jokowi bermula ketika ia maju sebagai calon walikota Solo bersama FX Hadi Rudyatmoko pada tahun 2015 dan menjadi pemenang dengan perolehan suara 36, 62 persen. Pada periode ini, Jokowi mampu menunjukkan kinerja yang baik dengan penataan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, *rebranding* kota Solo sebagai *the spirit of Java* dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).¹⁴ Hal yang menunjukkan Jokowi sebagai pemimpin populis harapan rakyat tergambar dalam penataan PKL. Dalam tulisannya, Scholahuddin menulis bahwa keberhasilan menata PKL ini menimbulkan kekaguman dan keingintahuan akan pendekatan Jokowi karena persoalan PKL ini merupakan persoalan yang sudah lama dikeluhkan oleh publik. Ternyata, Jokowi menggunakan pendekatan 'meja makan' dalam membujuk PKL untuk pindah.¹⁵ Di bidang kesehatan dan pendidikan, Jokowi membuat Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Dengan program tersebut, Jokowi membantu

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm.230.

¹² Bdk. Aspinnall E (2015) Oligarchic populism: Prabowo Subianto's challenge to Indonesian democracy, dalam Mietzner, *ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ detikNews, "Begini Perjalanan Politik Jokowi, 'Si Capres Kerempeng,'" detikNews, 2014, <https://news.detik.com/berita/d-2723501/begini-perjalanan-politik-jokowi-si-capres-kerempeng>, diakses pada 15/10/2024.

¹⁵ Scholahuddin Mz merupakan seorang reporter *Ekonomi-Bisnis* di harian lokal di Solo yang pernah mewawancarai Jokowi ketika Jokowi masih sebagai eksportir mebel pada tahun 1997, bdk. Scholahuddin Mz "Jokowi-JK, Pendekatan Berbeda untuk Membangun Negeri", dalam Kompasiana, *Presiden Jokowi: harapan baru Indonesia*. (2014). Indonesia: PT Elek Media Komputindo, hlm. 57.

masyarakat miskin yang kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga *blusukan* dengan menggunakan sepeda untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat.¹⁶

Gaya yang sama dilakukan oleh Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini tampak pada adanya Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar dan penataan PKL di sejumlah wilayah seperti di Tanah Abang, kawasan kumuh di Waduk Pluit dan penerapan sistem pajak *online* yang sangat efisien.¹⁷ Gaya *blusukannya* ini didukung oleh latar belakang Jokowi yang datang dari kelas menengah. Selain itu, penampilan fisiknya menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat kecil. Jokowi kerap kali menyebut dirinya sebagai orang berwajah *ndeso* (orang desa). Scholahuddin Mz menulis bahwa penampilan fisik Jokowi yang unik menggambarkan penampilan mayoritas rakyat Indonesia yang hidup di pedesaan. Hal ini menunjukkan secara simbolik bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang dekat dengan rakyat.¹⁸ Ketika menjadi Gubernur, Jokowi selama sebulan hanya *blusukan* ke kampung-kampung tanpa melakukan apa-apa. Gaya *blusukan* Jokowi ini pernah ditulis oleh Joe Cochrane dan dimuat di majalah *New York Times*.¹⁹

Pada tahun-tahun awal, Jokowi tidak berminat pada hal-hal yang berbau politik dan perdebatan ideologis, meskipun bapaknya adalah salah seorang anggota kelas bawah di Partai Demokrasi Indonesia (Partai yang dibuat Sukarno pada tahun 1920). Dalam memoarnya, ia tidak menyebut PDI atau Sukarno yang berperan pada kemampuan intelektualnya.²⁰ Mengutip Endah, Mietzner menulis bahwa Jokowi lebih menyukai musik Rock daripada berdiskusi tentang politik. Ketika temannya yang lain demonstrasi pada tahun 1998, kemungkinan besar Jokowi tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat karena tidak berminat dengan ihwal politis.²¹ Ketika Jokowi berkembang dalam bisnisnya, ia kemudian hendak membantu masyarakat biasa yang menurutnya terjebak dalam sistem yang korup dan penguasa yang tidak kompeten. “Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal; waktu kecil, saya diidentifikasi sebagai orang kecil (*wong cilik*), saya adalah bagian dari mereka, dan sekarang waktunya berbuat sesuatu untuk mereka”, kata Jokowi pada satu kesempatan pidato kampanye.²² Di sini terlihat bahwa pendekatan yang digunakan oleh Jokowi adalah pragmatis non-ideologis dan emosional-simpatik.

Berlatar belakang demikian, pada pilpres 2014, Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang cocok sebagai antitesis terhadap kelompok elit Indonesia. Bahkan Jokowi disamakan dengan Barack Obama sehingga memperkuat keyakinan dari pendukung Jokowi akan kepantasannya sebagai pemimpin. Hal ini juga didukung dengan realita bahwa Jokowi bukan residu dari Orde Baru, bukan pelanggar HAM seperti

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Gaya Jokowi Memimpin Jakarta Dalam 100 Hari* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm.72.

²⁰ Marcus Mietzner, *Political Contestation in Indonesia, East West Center*, 2015, hlm.24 <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/3d9198af-bc5c-4554-a16a-de7b3272d91e/content>.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

lawan politiknya. Faktor ini memperkuat dukungan para pro-demokrasi terhadap Jokowi sebagai simbol kemenangan reformasi dan pro-aktivis.²³ Karena itu, Jokowi diyakini bisa menyelesaikan masalah-masalah HAM berat dan meminta pertanggungjawaban dari pelanggar HAM di masa lalu. Dengan itu, Jokowi memenangkan pilpres 2014.

Mietzner menamakan populisme Jokowi sebagai populisme teknokratis.²⁴ Orang-orang dalam populisme Jokowi merupakan orang-orang yang secara administratif mengalami kesulitan dalam hidup. Karena itu, Jokowi berjanji untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan membentuk pemerintahan yang bersih. Jokowi menjanjikan birokrasi yang lebih baik dalam melayani rakyat.²⁵ Ia mewujudkannya dalam bentuk program kesehatan dan pendidikan gratis. Ia menggambarkan dirinya sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan golongan bawah melalui penampilan, komunikasi, perjumpaan langsung dengan rakyat dan kadang membuat persetujuan atau mendengarkan solusi dari rakyat secara langsung untuk menyelesaikan masalah.²⁶ Dengan itu, Mietzner menyatakan bahwa populisme Jokowi sangat unik karena tidak secara gamblang menyerang kelompok elite yang cenderung korup tetapi justru mengarah pada pembaharuan birokrasi. Inilah yang Mietzner sebut sebagai populisme teknokratis.

Pada sisi lain, taktik politik Jokowi dilihat sebagai kolaborasi antara populisme dan *developmentalism* (infrastrukturalisme).²⁷ Hal ini tampak dalam prioritas pembangunan infrastruktur dengan biaya yang sangat mahal. Kesejahteraan kaum miskin dibiayai oleh negara tanpa ada upaya untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Bahkan, pola yang dibuat Jokowi dalam menganeksasi populisme dengan infrastrukturalisme dibuat dengan nuansa nasionalis yang tampak dalam pembentukan Istana Negara di IKN dengan burung Garuda sebagai simbol nasionalisme.²⁸

Populisme Jokowi dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi

Menurut Chantal Mouffe, tugas politik adalah merancang populisme kiri untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan warga yang tidak terakomodasi dalam politik *status quo*.²⁹ Kekuatan dari populisme kiri adalah sifatnya yang antagonistik. Karena itu, hal mutlak yang dikandung oleh populisme kiri adalah pertentangan. Pertentangan di sini mengarah kepada pertentangan antara *the people* (rakyat) yang tertindas dengan *the other* (elit, oligarki) yang cenderung korup. Dalam hal ini, rakyat adalah masyarakat biasa yang merupakan korban dari kelompok elit yang korup dan tidak adil. Mereka ini tidak diwakilkan dalam kekuasaan sehingga memberontak dan bersikap kritis terhadap kekuasaan. Sementara itu, elit

²³ S. Dian Andryanto (ed.), "Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi Dalam Jokowiisme, Populisme Dan Infrastrukturalis," tempo.co, 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1926309/kurawal-foundation-kupas-strategi-utama-politik-jokowi-dalam-jokowisme-populisme-dan-infrastrukturalis>, diakses pada 15/10/2024.

²⁴ Mietzner, *Political Contestation in Indonesia*, *op.cit*, hlm.54-60.

²⁵ Abubakar Eby Hara, "Populism in Indonesia and Its Threats to Democracy" 129, no. Icsps 2017 (2018): 108, <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.23>.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ S. Dian Andryanto (ed.), *loc.cit*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm. 66.

adalah mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan atau memegang kekuasaan.³⁰ Pertentangan antara rakyat yang tertindas dengan elit yang mempertahankan *status quo* memperlihatkan bahwa roh dasar dari populisme (populisme kiri) adalah *anti-status quo*. Sementara itu, hilangnya antagonisme dari populisme ini cenderung melahirkan suatu gerakan pada spektrum kanan yang hanya menjadikan rasa simpati terhadap rakyat sebagai instrumen untuk memenangkan dukungan dan akhirnya melanggengkan kekuasaan, mempertahankan oligarki, dan memelihara sistem yang korup.

Menjelang pilpres 2019, sekurang-kurangnya ada tiga populisme yang tampak, yakni populisme Prabowo, populisme Jokowi, dan populisme Islam. Pendukung populisme Prabowo meyakini bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas untuk melindungi negara dan mengatur multikultural di Indonesia. Populisme Prabowo diklaim cenderung agresif. Berbeda dengan Prabowo, populisme ala Jokowi berkarakter lebih moderat. Kesederhanaan, komunikasi, dan pakaian-pakaiannya menunjukkan bahwa ia adalah representasi dari rakyat kecil. Ia terus membangun infrastruktur sebagai program utamanya dan menarik perhatian elit dan parlemen untuk mendukungnya. Di parlemen, Jokowi memperkuat koalisinya. Hal inilah yang mempermudah Jokowi dalam mengimplementasikan kebijakan politiknya. Selain dua populisme tersebut, populisme juga datang dari kelompok Islam, yang menyata dalam gerakan pembelaan Islam pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Menariknya, Jokowi memadukan antara populismenya dengan populisme Islam yang terwujud dalam keterpilihan wakilnya. Artinya, di samping Jokowi memiliki corak populisme tersendiri, ia juga menggunakan populisme Islam. Ketika menjabat sebagai presiden periode kedua, Jokowi memadukan ketiganya dengan menjadikan Prabowo sebagai bagian dari pemerintahannya dan seorang ulama Islam sebagai wakil presidennya.³¹ Hal ini memperlihatkan populisme Jokowi bukan merupakan populisme kiri yang menekankan antagonisme. Dengan merangkul kedua jenis populisme lainnya, antagonisme itu lenyap, meskipun antagonisme yang dimaksudkan dalam pengertian populisme kiri adalah perlawanan kelompok elit.

Tentu, populisme Jokowi ini berpengaruh terhadap kemerosotan demokrasi. Populisme Jokowi berpengaruh pada kemunduran demokrasi karena beberapa alasan mendasar. Pertama, Jokowi menggunakan populisme agama Islam untuk merebut pendukungnya. Penggunaan sentimen agama untuk merebut perhatian pendukung justru mencederai demokrasi. Sentimen agama selalu menempatkan setiap perbedaan agama pada tempat mereka masing-masing dan dipertentangkan satu sama lain. Artinya, sentimen agama menolak pluralitas agama dan keyakinan. Konsekuensinya adalah agama mayoritas akan mengucilkan agama minoritas dan hak agama minoritas terlarut dalam kepentingan agama mayoritas. Mengutip Hadiz, Otto Gusti menulis bahwa Jokowi yang sesungguhnya meraih kekuasaan dengan gaya

³⁰ Mudde, Cas, and Cristóbal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, Very Short Introductions (New York, 2017; online edn, Oxford Academic, 23 Feb. 2017), hlm.12, <https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001>, accessed 10 Oct. 2024.

³¹ Mietzner, "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response", *op.cit.*, hlm.230.

populistik kiri justru pada sisi lain terlihat gerakan populisme kanan. Populisme kanan ini mewujud dalam bentuk Islam konservatif dan gerakan ultra-nasionalisme sempit. Haviz menegaskan hal tersebut sebagai cara kerja intra-oligarkis di Indonesia.³² Oligarki menyembunyikan diri dan mengelabui mata rakyat dengan mempermainkan moralitas sektarian agama.

Kedua, dengan merangkul dua jenis populisme lainnya, Jokowi mempersempit adanya antagonisme. Antagonisme dalam arti ini adalah oposisi. Jokowi membangun koalisi yang gemuk dengan merangkul para oposannya dalam pemerintahan. Apabila oligarki tersebar dalam tubuh parlemen, partai-partai, maka pembengkakan koalisi sama artinya membangun komunitas oligarki yang lebih besar. Dengan itu, sebagaimana dikatakan Otto Gusti, populisme gagal berdaya transformatif karena ia tidak dijadikan sebagai kekuatan antagonistik terhadap kekuatan oligarki.³³ Dalam tulisannya, Hara menulis “Meski tidak otoriter seperti mantan Perdana Menteri Thailand yang populis Thaksin Sinawatra saat berkuasa, Jokowi menunjukkan sikap yang semakin kasar terhadap lawan politiknya.”³⁴ Ia mencontohkan penggunaan kata “*beat*” untuk mereka yang mengancam kesatuan Indonesia. Bagi kelompok oposisi, pemerintah mengusulkan UU Organisasi Massa yang disinyalir membungkam tidak hanya mereka yang disebut sebagai anti-Pancasila tetapi juga mereka yang mengambil posisi oposisi di masyarakat. Atas dasar itu, muncul kecemasan di banyak kalangan akademisi dan oposisi terkait penyalahgunaan Undang-Undang untuk menekan kebebasan dan membungkam pembangkang.³⁵

Temuan Radians Krisna Febriandy dan Umaimah Wahid menunjukkan bahwa ada tiga (3) penyebab utama kemunduran demokrasi Indonesia, yakni kebebasan berekspresi, kualitas pemilu dan dominasi kekuatan eksekutif terhadap lembaga lainnya.³⁶ Kebebasan berekspresi ditekan oleh pemerintah dengan mengeluarkan aturan yang membatasi kebebasan media dan kritik publik. Sementara itu, turunnya kualitas pemilu terjadi karena adanya intervensi pemerintah dan manipulasi dalam proses pemilu. Sedangkan, dominasi kekuatan eksekutif mengakibatkan hilangnya *check and balance* dalam tubuh demokrasi.³⁷ Di samping itu, Wasisto Raharjo Jati, Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan tiga penyebab menurunnya demokrasi, dan salah satunya adalah pelibatan peran aktif militer dalam sektor publik.³⁸

Keterlibatan militer ini bertujuan untuk memperlancar pembangunan ekonomi. Jokowi menginginkan pembangunan ekonomi yang ia rancang dapat berjalan tanpa hambatan. Karena itu, langkah pertama yang dibuat adalah penciptaan stabilitas sosial.³⁹ Hemat penulis, tidak ada yang salah dengan penciptaan stabilitas sosial apabila pemenuhannya dicapai dengan memenuhi hak-hak seluruh

³² Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm.72.

³³ Otto Gusti Madung, “Populisme dan Krisis Demokrasi,” *Media Indonesia*, 8/3/2018, diakses pada 15/10/2024.

³⁴ Eby Hara, *op.cit.*, hlm.110.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Radians Krisna Febriandy dan Umaimah Wahid, “KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS LAPORAN VARIETIES OF DEMOCRACY (V-DEM) INSTITUTE 2024,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 7 (2024): 1041–50.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Jati, “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021”, *loc.cit.*

³⁹ *Ibid.*

masyarakat. Namun, stabilitas sosial tidak dibenarkan apabila dicapai dengan memainkan peran militer untuk merepresi suara kritis yang bertentangan dengan pemerintah baik dalam dunia nyata maupun secara virtual. Menurut penulis, ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi dalam hal ini yakni pertama, Jokowi mengalihkan perhatian militer yang sejatinya pada urusan pertahanan negara kepada urusan sipil; kedua, militer dijadikan instrumen untuk merepresi pengkritik atau demonstran. Semua ini adalah cerminan hilangnya antagonisme dalam populismenya maupun dalam demokrasi yang justru meniscayakan adanya pertentangan. Maksud yang sama dibahasakan oleh Febriandy dan Wahid, yakni dominasi kekuatan eksekutif untuk menghilangkan ‘pengganggu’ dalam tubuh demokrasi. Dengan itu, Jokowi memperlihatkan diri sebagai pemimpin yang anti kritik.

Perlakuannya terhadap lawan politik bisa jadi berangkat dari prinsip Jawa bahwa matahari tidak boleh kembar. Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, mengatakan bahwa cara paling efektif untuk melumpuhkan calon lawan adalah membeli mereka dengan menawarkan jabatan, sogokan, imbalan, dan bisnis, atau mengeluarkannya dari ‘arena permainan’.⁴⁰ Artinya, ada dua pilihan sikap terhadap lawan politik yakni atau merangkul atau mengeliminasi.⁴¹ Tentu saja, eliminasi dengan membungkam lawan politik adalah suatu pencederaan terhadap demokrasi. Perlakuan demikian berdampak pada hilangnya *check and balance* dalam tubuh demokrasi karena demokrasi hanya akan hidup sejauh ada ‘pengganggu’ sebagai alat kontrol kekuasaan. Rocky Gerung menulis bahwa “batas dari demokrasi adalah hak asasi manusia. Rasionalitas ini kita perlukan untuk mencegah politik mayoritas memanfaatkan instalasi demokrasi menjadi saluran totalitarianisme.”⁴² Karena itu, antagonisme dan oposisi merupakan sesuatu yang niscaya ada dalam demokrasi. Bahkan, demokrasi hanya bisa terawat apabila ada oposan sebagai *check and balance*. Karena itu, pembungkaman oposan merupakan pelanggaran kebebasan ekspresi dan hak manusia yang dengan sendirinya merusak demokrasi.

Ketiga, sebagaimana disinyalir Adryanto, model politik Jokowi berdiri pada dua kaki, yakni populis-infastrukturalis. Jokowi cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur yang masif daripada mengaktualisasikan kehendak rakyat umum. Bukankah pembangunan infrastruktur merupakan suatu bentuk manifestasi kehendak rakyat akan fasilitas? Menurut penulis, alih-alih manifestasi kehendak rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, sesungguhnya pembangunan tersebut adalah pemberian peluang untuk oligarki, kapitalis, dan investor untuk memperbesar jaringan bisnis mereka. Dengan itu, dalil manifestasi kehendak rakyat hanyalah pengalihan dari pemberian lapangan bisnis untuk para oligarki-kapitalis. Contohnya adalah pembangunan Ibukota Negara di IKN. Atas nama pembangunan ibukota negara, banyak investor manca negara diundang membuka proyek di sana. Proyek IKN menjadi proyek baru untuk investor dan oligarki untuk mendulang modal, sementara kepentingan rakyat banyak disisihkan.

⁴⁰ Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati*, Penerj. Zia Anshor (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.64.

⁴¹ Jati, “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021”, *ibid.*

⁴² Panggabean, *Demokrasi Dan Kekecewaan*, *op.cit.*, hlm.20.

Gaya kepemimpinan Jokowi bukan merupakan populisme kiri yang sarat akan pertentangan untuk melawan elit yang korup. Sebaliknya, populisme Jokowi adalah populisme kanan yang ‘bertopengkan’ populis tetapi memelihara oligarki. Ini tampak dalam bentuk pelemahan KPK. Berdasarkan survei Litbang Kompas, Yohan Wahyu menyatakan bahwa berjaraknya sikap publik dengan sikap elit merupakan satu tanda degradasi demokrasi. Hal ini tampak dalam perbedaan sikap terhadap Revisi UU KPK pada 2019, UU Cipta Kerja pada 2020, Pilkada Serentak saat pandemi 2020, dan wacana Presiden tiga periode dan penundaan pemilu pada 2022.⁴³ Dengan demikian, kepentingan elit dan oligarki merupakan prioritas utama dibandingkan aspirasi rakyat. Kedaulatan rakyat sebagai basis legitimasi kepemimpinan demokratis tidak mendapatkan tempat dalam lingkaran elit. Hal inilah yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Jokowi memengaruhi degradasi kualitas demokrasi Indonesia belakangan ini.

Kritik: Satu Cara Merawat Demokrasi

Demokrasi didasarkan pada kebebasan dan hak asasi manusia. Konsekuensinya, antagonisme selalu ada dalam demokrasi. Penghargaan akan kebebasan dalam demokrasi berarti juga glorifikasi keunikan individu. Individu itu unik karena berbeda. Maka, demokrasi hanya bisa terawat bila antagonisme diberi ruang. Pembatasan kebebasan berpendapat dan pembungkaman suara-suara kritis merupakankses dari ketiadaan pemberian ruang terhadap antagonisme.

Bila berkaca pada kepemimpinan Jokowi tadi, penulis mengklaim bahwa Jokowi bukan merupakan sosok yang tepat dalam merawat nilai-nilai demokrasi. Hal ini tampak pada pembungkaman suara kritis dan lahirnya Undang-Undang yang membatasi kebebasan pers. Sementara itu, dalam negara demokratis oposan sangat diperlukan sebagai pengontrol jalannya pemerintahan dengan memberikan kritikan. Menurut penulis, yang membedakan negara demokrasi dari monarki adalah kesadaran bahwa kekuasaan cenderung menyeleweng. Berbeda dari monarki, demokrasi selalu menyadari bahwa kesalahan, kekeliruan, penyelewengan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah hal yang sangat mungkin terjadi sehingga pemerintahan diberikan kepada banyak orang, yakni kedaulatan rakyat untuk mengontrol kemungkinan salah tersebut. Lord Action mengatakan bahwa “*power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely*”.⁴⁴ Dengan demikian, karena kekuasaan cenderung korup maka bersikap kritis merupakan sikap yang sangat diperlukan untuk mengontrol kemungkinan salah atau kecenderungan korup tersebut.

Meskipun kritik sangat penting dalam demokrasi, penguasa cenderung melihat lawan politiknya sebagai musuh. Pandangan ini melahirkan anggapan bahwa kritikan dari lawan politik merupakan cara untuk menghambat pelaksanaan kebijakan atau pemerintahan. Karena itu, eliminasi lawan politik dianggap sebagai upaya terbaik untuk melaksanakan kebijakan. Dalam *talkshow* di TV, kerap kali komentar mereka yang berada dalam wilayah kekuasaan terhadap kritikan adalah “itu hal wajar dalam demokrasi”. Hal ini memang wajar dalam demokrasi apabila dasar pandangannya adalah kritikan sebagai

⁴³ Agustino, Suryana, and Silas, *25 Tahun Demokrasi Indonesia, op.cit.*, hlm. 8-10.

⁴⁴ Abd. Halim, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, Faizal Indra (ed.), (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013), hlm. 14.

check and balance atau pengontrol. Namun, komentar tersebut rupanya diucapkan hanya untuk menimbulkan kesan demokratis semata. Kewajaran tersebut justru didasarkan pada pandangan bahwa kritikan merupakan bentuk ketidakpuasan dari mereka yang kalah dalam kontestasi pemilu. Akibatnya, elit politik atau pemerintah tetap mengambil keputusan tertentu tanpa mempertimbangkan penolakan dari rakyat atau oposisi. Hal ini koheren dengan Survei Litbang Kompas yang diulas oleh Yohan Wahyu yang menegaskan bahwa berjaraknya publik dengan elit merupakan salah satu penyebab mundurnya kualitas demokrasi.⁴⁵

Berdasarkan pertimbangan ini, penulis menegaskan bahwa kritik adalah cara yang mutlak perlu dalam demokrasi. Demokrasi hanya terawat apabila suara-suara kritis tidak dibungkam. Aristoteles menyatakan bahwa prinsip “mengatur dan diatur secara bergantian” dibuat atas dasar pengalaman penguasa menggunakan kekuatannya untuk tujuan pribadi dan mengabaikan kebaikan bersama.⁴⁶ Aristoteles menamakan penyelewengan penguasa dari kebaikan bersama ini sebagai ketidaksempurnaan alami manusia. Menurutnya, jika prinsip tersebut sebagai antisipasi ketidaksempurnaan alami manusia merupakan prinsip penting pembentukan konstitusi terbaik, maka awal dari politik adalah ketidaksempurnaan manusia yang bukan merupakan sifat idealnya.⁴⁷ Karena itu, negara yang mengekspresikan sifat ideal manusia sama banyaknya dengan ekspresi kelemahan-kelemahannya yang adalah kemungkinan idealnya.⁴⁸ Artinya, kebaikan yang mampu diwujudkan oleh suatu negara tidak lain adalah hasil dari perjuangan meminimalisasi kekurangan atau kelemahan dari ketidaksempurnaan alami manusia. Hemat penulis, perjuangan meminimalisasi kekurangan itu bisa ditempuh melalui kritik. Dengan demikian, kritik adalah pengontrol bagi kekuasaan untuk tidak tergelincir pada kemungkinan salah atau kecenderungan korup.

Penutup

Kemerosotan demokrasi Indonesia belakangan ini tidak terlepas dari model kepemimpinan populisme Jokowi. Namun, populisme Jokowi lebih bercorak kanan daripada beraliran kiri. Hal ini terlihat dalam kebijakannya yakni pembangunan infrastruktur yang justru memelihara kaum elit dan oligarki. Jokowi tidak melawan kaum elit dan oligarki yang korup. Krisis demokrasi yang berhubungan dengan model populisme kepemimpinan Jokowi tampak dalam beberapa hal. Pertama, Jokowi menggandeng populisme Islam sebagai instrumen untuk menggalang dukungan dalam kepemimpinannya. Akibatnya, demokrasi menurun karena masyarakat dipecahkan dalam perbedaan keyakinan. Sekat-sekat perbedaan semakin diperlebar. Kedua, Jokowi memperkecil antagonisme dengan menjadikan lawan politiknya sebagai bagian dari pemerintahan. Prabowo sebagai lawannya dengan latar belakang militer dijadikan sebagai bagian dari kekuasaan. Selain itu, Jokowi melibatkan peran militer dalam ranah sipil. Hal ini berekses pada ruang kebebasan berpendapat atau kritik yang sempit karena militer

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁶ Wawan Kurniawan (ed.), *Politics Aristoteles*, penerj. Artika Sari (Yogyakarta: BASABASI, 2020), hlm.17.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ *Ibid*.

ditransformasikan sebagai penekan suara-suara kritis. Pembungkaman suara kritis mengakibatkan kesulitan kebebasan berekspresi yang merupakan substansi dari demokrasi itu sendiri. Ketiga, populisme infrastrukturalis yang lebih mengutamakan infrastruktur tetapi kebutuhan rakyat banyak diabaikan. Selain itu, berkaca pada kepemimpinan Jokowi yang memperkecil oposisi, pemimpin bangsa selanjutnya mesti sadar bahwa keberadaan oposisi dan kritikan sangat penting. Dengan pertimbangan yang sudah dielaborasi penulis mengenai urgensi kritikan dalam tubuh demokrasi, pemimpin selanjutnya bisa memberikan ruang bagi setiap orang untuk memberikan kritikan. Dengan itu, demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan dinamika yang ‘sehat’.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, Nanang Suryana, and Jonah Silas, eds. *25 Tahun Demokrasi Indonesia*. Pertama (Bandung: PT. Tubagus Lima Korporat, 2023).
- Ali-Fauzi, Ihsan dan Samsu Rizal Panggabean, eds. *Demokrasi Dan Kekecewaan*, vol. 16 (Jakarta: Democracy Project, 2022).
- Andryanto, S. Dian (ed.) “Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi Dalam Jokowiisme, Populisme Dan Infrastrukturalis,” *tempo.co*, 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1926309/kurawal-foundation-kupas-strategi-utama-politik-jokowi-dalam-jokowisme-populisme-dan-infrastrukturalis>.
- detikNews. “Begini Perjalanan Politik Jokowi, ‘Si Capres Kerempeng,’” *detikNews*, 2014, <https://news.detik.com/berita/d-2723501/begini-perjalanan-politik-jokowi-si-capres-kerempeng>.
- Febriandy, Radians Krisna dan Umaimah Wahid. “KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS LAPORAN VARIETIES OF DEMOCRACY (V-DEM) INSTITUTE 2024,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 7 (2024): 1041–50.
- Halim, Abd. *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, Faizal Indra (ed.), (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013).
- Hara, Abubakar Eby. “Populism in Indonesia and Its Threats to Democracy” 129, no. Icsps 2017 (2018): 108, <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.23>.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021”. *The Habibie Center THC Insights*, no. 27 (2021): 6, www.habibiecenter.or.id.
- Levitsky, Steven and Daniel Ziblatt. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Penerj. Zia Anshor (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Madung, Otto Gusti. “Populisme dan Krisis Demokrasi,” *Media Indonesia*, 8/3/2018.
- . “Populisme, Krisis Demokrasi, Dan Antagonisme | Populism, the Crisis of Democracy, and Antagonism”. *Jurnal Ledalero* 17, no. 1 (2018): 58, <https://doi.org/10.31385/jl.v17i1.129.58-76>.
- Mietzner, Marcus. “Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response”. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 229, <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.
- . *Political Contestation in Indonesia*, *East West Center*, 2015, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/3d9198af-bc5c-4554-a16a-de7b3272d91e/content>.
- Mudde, Cas, and Cristóbal Rovira Kaltwasser. *Populism: A Very Short Introduction*, Very Short Introductions (New York, 2017; online edn, Oxford Academic, 23 Feb. 2017), <https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001>, accessed 10 Oct. 2024.

- Pusat Data dan Analisa Tempo, "Gaya Jokowi Memimpin Jakarta Dalam 100 Hari" (Jakarta: Tempo Publishing, 2019).
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Survei 'Litbang Kompas': Citra Positif Jokowi Ditopang Kinerja Pemerintahan," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/11/10052931/survei-litbang-kompas-citra-positif-jokowi-ditopang-kinerja-pemerintahan>.
- Scholahuddin Mz. "Jokowi-JK, Pendekatan Berbeda untuk Membangun Negeri", dalam Kompasiana, *Presiden Jokowi: harapan baru Indonesia*. (2014). Indonesia: PT Elek Media Komputindo, hlm. 57.
- Sukarno, Mahattama Banteng. "Banalitas Demokrasi Di Era Jokowi," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/01/08095531/banalitas-demokrasi-di-era-jokowi>.
- Trianita, Linda Novi (ed.). "3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi", tempo.co., 13 Februari 2024 <[3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi - Metro Tempo.co](#)> diakses pada 10/10/2024.